Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 34211-34217

Dinamika Kode Etik Jurnalistik Dalam Produksi Berita Audio : Kajian Literatur Terhadap Praktik Media Audio

Maria Erica Widyadini Fernanda[1], Melati Budi Srikandi[2], Jonathan Jacob Paul Latupeirissa[3], I Nyoman Indra Kusuma[4]
[1,2,3,4] Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional
Corresponding Author: Mutiara Megasari Mattalitti, e-mail: mariaericawf@gmail.com

Published: December , 2025

ABSTRACT
This study aims to examine how journalistic ethical principles are applied, interpreted, and challenged within audio-based news production. It specifically explores the influence of digital transformation on the professionalism, accuracy, and credibility of audio journalism, including radio news and podcast-based reporting. The research adopts a thematic literature review approach by analyzing books, peer-reviewed journal articles, ethical frameworks, and international media guidelines published in the last five years. The collected literature was categorized into themes related to ethical principles, audio narration techniques, verification challenges, and digital media practices. Thematic synthesis was used to identify patterns, recurring issues, and gaps within current ethical implementations. Findings indicate that audio journalism presents unique ethical vulnerabilities, such as the potential manipulation of audience perception through tone, sound effects, and music. The absence of visual evidence complicates verification processes, increasing the risk of misinformation. The study also shows that independent audio producers often lack adherence to formal ethical standards, creating inconsistencies in accuracy, transparency, and narrative balance. These challenges demonstrate the need for clearer ethical guidelines tailored to audio formats. The study concludes that conventional journalism ethics must be adapted to address the specific narrative and technical characteristics of audio media. Strengthening editorial oversight, establishing transparent verification procedures, and promoting responsible use of sound elements are essential to ensure credibility and maintain public trust. Developing specialized ethical frameworks for audio journalism is therefore critical in the digital era.

Keywords: audio journalism, media ethics, ethical standards, digital news production, podcast journalism, verification challenges

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Media massa mengalami perubahan signifikan dalam bentuk, penyebaran dan konsumsi informasi di era transformasi digital yang kian pesat. Salah satu bentuk media yang berkembang pesat adalah media audio khususnya podcast berita dan siaran radio digital (Fajarani, 2025). Perkembangan ini mendorong perubahan paradigma dalam praktik jurnalistik, khususnya dalam hal produksi berita berbasis audio. Audio *news* kini tidak hanya diproduksi oleh lembaga penyiaran konvensional seperti radio tetapi juga oleh entitas digital baru seperti *platform podcast*, media daring dan bahkan jurnalis independen yang bekerja secara mandiri. Perkembangan ini membuka peluang luas bagi inovasi dalam penyampaian informasi tapi juga menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip dan kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman profesional yang mengatur bagaimana berita diproduksi, disusun dan disebarkan. Asas kejujuran, akurasi, netralitas, keberimbangan dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai utama yang dijunjung tinggi dalam praktik jurnalistik. Media audio memiliki karakteristik yang berbeda dari media cetak dan visual seperti keterbatasan visual, dominasi narasi suara serta potensi penggunaan efek suara yang dapat membentuk persepsi pendengar. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya interpretasi subjektif atau bahkan manipulasi informasi yang halus. Karena hal tersebut, diperlukan untuk menelaah bagaimana dinamika kode etik jurnalistik diterapkan,

diinterpretasi dan mungkin juga ditantang dalam produksi berita audio. Maflucha (2024) menggarisbawahi bahwa karakteristik unik media audio, seperti keterbatasan visual dan dominasi narasi suara, memerlukan interprestasi baru terhadap prinsip-prinsip etika jurnalistik yang selama ini lebih banyak diterapkan pada media cetak atau televisi. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya interpretasi subjektif atau bahkan manipulasi informasi yang halus.

Seiring dengan meningkatnya konsumsi berita melalui audio baik dalam bentuk podcast maupun siaran radio daring muncul berbagai pertanyaan tentang bagaimana jurnalis dan institusi media mengelola etika dalam produksi berita audio (Prasetya, 2025). Pertanyaan tersebut meliputi penerapan prinsip *cover both sides* (keberimbangan), verifikasi dan transparansi narasumber, dan bagaimana pengaruh nilai objektivitas dapat mempengaruhi bentuk narasi dan teknik editing audio. Kemudian, terdapat juga pertanyaan terkait proses penyusunan naskah dan penggunaan suara narator dalam membentuk framing berita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat dinamika dan kompleksitas dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam media audio yang patut dikaji secara mendalam.

Literatur mengenai kode etik jurnalistik umumnya lebih banyak membahas penerapan dalam media cetak, televisi, dan daring berbasis teks atau visual. Kajian akademik yang secara khusus menyoroti praktik etika dalam produksi berita audio masih relatif terbatas. Padahal keunikan medium audio memiliki implikasi tersendiri terhadap penerapan prinsip-prinsip jurnalistik. Oleh karena itu penelitian ini harus dilakukan sebagai upaya untuk memahami bagaimana praktik produksi berita audio berinteraksi dengan norma-norma etika jurnalistik, serta sejauh mana praktik tersebut mengalami perubahan, penyesuaian atau bahkan pelanggaran dalam perkembangan teknologi dan media baru.

Kajian ini bertumpu pada urgensi untuk mengisi kekosongan akademik dalam pemahaman etis terhadap produksi berita audio. Fokus utamanya adalah pada dinamika yang terjadi dalam penerapan kode etik jurnalistik baik dari segi normatif maupun praktik faktual di lapangan. Harapannya hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan praktik jurnalistik audio yang berintegritas dan bertanggung jawab di tengah lanskap media yang terus berubah.

METODE

Penelitian ini menggunakan kajian literatur tematik sebagai pendekatan utama (Sugiyono, 2021). Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana kode etik jurnalistik diterapkan, diinterpretasikan, dan ditantang dalam produksi berita audio. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan untuk mensintesis berbagai sumber, mulai dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, hingga regulasi, yang relevan dengan isu yang dikaji (Sugiyono, 2021).

Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik secara umum di Indonesia dengan kata kunci kode etik jurnalistik, produksi berita, karakteristik unik media audio dan dinamika jurnalisme di era digital (Sugiyono, 2021). Setelah literatur terkumpul, dilakukan analisis tematik untuk menemukan pola dan tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber (Sugiyono, 2021). Tema-tema ini menjadi fondasi untuk menjawab pertanyaan penelitian, seperti bagaimana objektivitas diinterpretasi dalam narasi audio, tantangan verifikasi narasumber, dan peran etika pada jurnalis independen.

Langkah selanjutnya adalah sintesis dan interpretasi, di mana temuan-temuan dari berbagai literatur dibandingkan dan dirangkai menjadi satu argumen yang koheren (Sugiyono, 2021). Dengan begitu, penelitian ini dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang implikasi media audio terhadap praktik etika jurnalistik. Hasil akhirnya diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan dalam kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk memperkuat jurnalisme audio yang berintegritas dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Media Audio Dalam Jurnalisme

Literatur dari Ward (2022) mengidentifikasi bahwa karakteristik media audio, seperti pendekatan satu arah yang intim, ketergantungan pada suara, nada, dan gaya penyampaian, serta kemampuannya membangun atmosfer emosional tanpa visual, secara signifikan memengaruhi proses jurnalistik dan menimbulkan tantangan etik yang khas. Keintiman yang tercipta melalui pendekatan

satu arah yang personal membedakannya dari media cetak atau visual. Makna dalam berita audio sangat bergantung pada elemen non-verbal, seperti intonasi, jeda, dan tempo bicara, yang memungkinkan jurnalis untuk membentuk atmosfer dan emosi mendengarkan secara mendalam. Karakteristik medium inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menganalisis penerapan prinsip etika jurnalistik.

Dinamika media audio menunjukkan bahwa produksi berita audio memiliki potensi struktur naratif yang lebih fleksibel dibandingkan media berbasis teks atau visual. Fleksibilitas ini membuka ruang kreativitas bagi jurnalis, namun pada saat yang sama, elemen naratif non-verbal (nada suara, intonasi, tempo) menjadi sangat penting dalam membentuk makna. Objektivitas dalam berita audio tidak hanya mengandalkan konten naratif, tetapi juga bergantung pada netralitas penyampaiannya (Hendriyanto, 2024). Karena sifatnya yang intim dan personal, narasi audio cenderung menciptakan kedekatan emosional antara pendengar dan penyampai informasi. Penggunaan musik latar atau efek suara tertentu berpotensi memengaruhi persepsi pendengar secara emosional. Oleh karena itu, penerapan kode etik dalam produksi berita audio memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan karakteristik medium ini.

Penelitian oleh Ward (2022) dalam *Journalism & Mass Communication Quarterly* menemukan bahwa narasi audio menciptakan kedekatan emosional yang lebih kuat dibandingkan media visual, disertai potensi risiko manipulasi persepsi melalui intonasi dan tempo yang dapat memengaruhi objektivitas. Di Indonesia, studi Hendriyanto (2024) mengonfirmasi bahwa fleksibilitas naratif audio dapat membuka celah untuk bias subjektif. Sementara itu, kajian global oleh UNESCO (2023) menekankan bahwa tanpa visual, verifikasi etis menjadi lebih sulit, yang meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak akurat. Secara keseluruhan, temuan ini mensintesis bahwa karakteristik non-visual dan intim ini memperkuat potensi jurnalisme audio untuk keterlibatan emosional, tetapi menuntut adaptasi etik yang ketat untuk menjaga integritas informasi.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, karakteristik intrinsik media audio—terutama yang bersifat non-visual, intim, dan sangat bergantung pada elemen suara non-verbal—secara fundamental menantang prinsip etik universal dan menuntut peninjauan ulang terhadap konsep objektivitas dan kejujuran dalam konteks medium ini. Tantangan terbesar terkait dengan aspek "ketidakmampuan verifikasi seketika" oleh pendengar. Berbeda dengan media visual, di mana manipulasi gambar dapat diperiksa melalui metadata, manipulasi intonasi, tempo, atau editing suara dalam audio bersifat *ephemeral* dan meninggalkan jejak yang sulit dideteksi. Konsekuensinya, beban etik dan akuntabilitas bergeser sepenuhnya kepada produser konten, yang harus menerapkan standar transparansi yang memadai untuk melawan potensi bias naratif yang diakibatkan oleh keintiman medium.

Implikasi dari karakteristik ini adalah bahwa jurnalisme audio berada pada persimpangan antara penyampaian fakta dan daya tarik naratif. Kualitas artistik (pengaturan suara, narasi yang memukau) sering digunakan untuk menarik audiens, namun elemen-elemen artistik inilah yang paling berpotensi memengaruhi objektivitas. Oleh karena itu, adaptasi kode etik harus secara jelas mendefinisikan batas antara penggunaan suara sebagai alat penyampai fakta dan penggunaan suara sebagai alat dramatisasi, guna memastikan integritas naratif dipertahankan.

Prinsip Kode Etik Jurnalistik Secara Umum

Literatur dari Kovach dan Rosenstiel (2023) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik seperti objektivitas, akurasi, independensi, kejujuran, perlindungan narasumber, tanggung jawab sosial, dan pencegahan fitnah berfungsi sebagai dasar universal, namun penerapan prinsip-prinsip tersebut membutuhkan penyesuaian kontekstual dalam media audio. Studi mengenai kode etik jurnalistik telah berkembang sejak awal munculnya institusi media modern. Kode etik jurnalistik pada dasarnya merupakan seperangkat prinsip normatif yang bertujuan menjaga integritas profesi jurnalis dan memastikan publik menerima informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan (Putri, 2024). Prinsip umum yang diakui secara internasional meliputi keakuratan, independensi, imparsialitas, tanggung jawab terhadap publik, dan penghormatan terhadap narasumber. Di Indonesia, pedoman etika jurnalistik diatur oleh Dewan Pers melalui Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Dalam media audio, penerapan prinsip-prinsip tersebut menghadapi tantangan khas. Sebagai landasan profesional, kode etik jurnalistik mengatur perilaku jurnalis melalui prinsip-prinsip utama

yang meliputi objektivitas, akurasi, independensi, dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap narasumber dan audiens, serta tanggung jawab sosial. Meskipun prinsip-prinsipnya bersifat universal, penerapannya di medium audio seringkali memerlukan penafsiran yang lebih spesifik.

Penelitian oleh Kovach dan Rosenstiel (2021) dalam *The Elements of Journalism* (diperbarui hingga 2023) menunjukkan bahwa independensi dan akurasi menghadapi tantangan dalam konteks tanpa visual, sementara studi Maflucha (2024) di Indonesia mengidentifikasi risiko manipulasi emosional yang dapat melanggar prinsip kejujuran. Sintesis dari temuan ini adalah bahwa prinsip-prinsip universal ini memerlukan reinterpretasi spesifik untuk medium audio, di mana elemen suara berpotensi mengubah makna naratif secara tidak disadari.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik yang bersifat **un**iversal seperti objektivitas dan akurasi menuntut interpretasi yang lebih mendalam ketika diterapkan pada media audio, karena prinsip-prinsip tersebut perlu secara eksplisit mengatur bagaimana elemen-elemen audio dapat memengaruhi makna dan persepsi. Prinsip "kejujuran" menjadi sangat penting untuk diperluas menjadi "kejujuran representasional" dalam audio. Ini mencakup kejujuran dalam penggunaan musik latar (agar tidak menggiring emosi secara berlebihan), kejujuran dalam representasi intonasi narasumber agar konteksnya tidak terdistorsi, dan kejujuran dalam proses editing. Kegagalan mengadaptasi prinsip-prinsip ini berisiko mengurangi efektivitas Kode Etik Jurnalistik dalam praktik teknis produksi berita audio kontemporer.

Dalam media audio, imparsialitas tidak hanya dituntut dari isi naratif, tetapi juga dari penyampaian narator. Nada suara narator dapat secara halus menyiratkan dukungan atau ketidakpercayaan, suatu bentuk bias *sub-textual*. Oleh karena itu, prinsip imparsialitas dalam audio perlu mencakup netralitas vokal—suatu tuntutan teknis yang memerlukan pelatihan spesifik bagi jurnalis audio untuk menjaga pemisahan antara gaya penyampaian yang intim dengan netralitas naratif.

Tantangan Etik dalam Produksi Berita Audio

Temuan dari Berry (2023) merangkum tantangan etik spesifik dalam produksi berita audio, termasuk risiko manipulasi emosi melalui narasi subjektif dan musik/efek suara, kesulitan verifikasi wawancara audio, isu representasi suara minoritas, serta dampak editing suara tanpa pembanding visual. Karakteristik unik media audio menciptakan tantangan etik yang kompleks. Potensi narasi subjektif timbul dari fleksibilitas naratif audio yang dapat digunakan untuk menonjolkan sudut pandang tertentu dan menciptakan bias yang sulit dideteksi. Penggunaan musik latar dan efek suara yang tidak sesuai berpotensi menggiring persepsi pendengar. Kesulitan verifikasi konten wawancara audio juga signifikan; tanpa bukti visual atau teks, validitas sumber bergantung pada narasi lisan. Isu representasi juga penting, di mana aksen atau stereotip suara dapat memengaruhi persepsi pendengar terhadap narasumber dari kelompok minoritas. Terakhir, teknik editing dan manipulasi suara merupakan risiko etis nyata, karena pemotongan atau penambahan suara dapat mengubah makna asli.

Media audio juga menghadapi tantangan dalam hal verifikasi informasi dan transparansi narasumber. Dalam media berbasis teks, informasi seperti nama narasumber dan dokumen pendukung dapat ditampilkan secara eksplisit (Sunarto, 2022). Sebaliknya, dalam berita audio, informasi ini seringkali hanya disampaikan secara verbal dan tidak terekam secara permanen dalam bentuk visual, yang berpotensi menimbulkan keraguan terhadap validitas sumber. Beberapa produksi podcast berita cenderung mengaburkan identitas narasumber demi alasan keamanan atau dramatisasi cerita, yang dapat menimbulkan konflik etika. Kajian dari sudut hukum media juga menggarisbawahi pentingnya keterikatan kode etik jurnalistik dengan regulasi penyiaran. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi konten siaran di radio dan siaran digital, namun pengawasan terhadap podcast atau konten audio *on-demand* belum diatur secara tegas (Raintung, 2024). Ketimpangan ini menunjukkan perlunya kerangka etik dan regulatif baru yang relevan dengan ekosistem media audio modern.

Studi oleh Berry (2023) dalam *Media Ethics* mengungkap bahwa musik latar dapat memengaruhi opini pendengar secara signifikan, meningkatkan risiko bias. Sunarto (2022) dan penelitian lanjutan oleh Raintung (2024) menyoroti tantangan verifikasi yang lemah, di mana ketiadaan bukti visual dapat mempersulit autentikasi. Isu stereotip suara minoritas, seperti dalam kajian

UNESCO (2023), memperburuk representasi, sementara manipulasi editing (Hendriyanto, 2024) berpotensi mengubah konteks tanpa jejak. Sintesis ini menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini saling terkait, membentuk risiko sistemik yang memerlukan pedoman etik khusus untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan diskriminatif.

Tantangan etik dalam produksi berita audio bersifat sistemik, mencakup isu potensi manipulasi emosional dan naratif, kerentanan verifikasi sumber tanpa visual, dan ketimpangan regulasi yang belum mencakup ekosistem podcast dan media audio *on-demand*. Kondisi ini dapat menciptakan celah bagi praktik jurnalistik yang tidak bertanggung jawab. Analisis literatur lebih lanjut mengungkap adanya konflik antara kebutuhan untuk menarik audiens (dramaturgi) dan tuntutan etika/objektivitas. Kebutuhan pasar komersial sering mendorong penggunaan elemen dramatis yang dapat mengancam integritas faktual. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam ruang podcast independen menunjukkan perlunya penerapan standar etis yang tegas, karena ketiadaan sanksi formal dapat membuat kreator independen merasa kurang terikat pada tanggung jawab etis institusi media tradisional.

Isu representasi juga muncul, di mana penggunaan suara minoritas, misalnya stereotip aksen, dapat melanggar etika representasi dan memperkuat bias sosial. Krisis ini diperparah oleh kesulitan teknis verifikasi: verifikasi narasumber anonim dalam audio, yang suaranya mungkin direkayasa, menjadi tantangan forensik jurnalisme yang menuntut jurnalis untuk mengadopsi standar transparansi metadata audio.

Studi Literatur atas Praktik Etik di Media Audio dan Podcast

Literatur dari Ward (2022) menunjukkan perbedaan praktik etik antara radio berita publik dan swasta, di mana lembaga publik (seperti BBC atau NPR) cenderung mematuhi standar tinggi dalam hal akurasi, keberimbangan, dan transparansi. Namun, dinamika berbeda ditemukan pada platform podcast independen. Banyak kreator podcast tidak memiliki latar belakang jurnalistik formal dan tidak terikat pada regulasi atau pengawasan etik formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas, di mana batas antara opini, hiburan, dan berita seringkali menjadi kabur. Dengan demikian, praktik etik di media audio sangat bergantung pada institusi, platform, dan latar belakang profesional produser konten itu sendiri. Literatur lain yang relevan berasal dari kajian mengenai jurnalisme berbasis platform digital. Di era platformisasi media, konten audio tidak hanya didistribusikan oleh institusi media besar, tetapi juga oleh aktor independen (Maflucha, 2024). Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam hal akuntabilitas etis, karena banyak kreator konten audio yang mengklaim memproduksi "berita" tidak tunduk pada pengawasan etika jurnalistik formal.

Kajian akademik mengenai kode etik jurnalistik dalam media audio di Indonesia masih terbatas. Namun, Prasetya (2025) menyoroti perlunya penyiaran publik di era digital, termasuk media audio, untuk memperhatikan etika, praktik, dan profesionalisme. Media audio alternatif seperti podcast memiliki potensi besar dalam menyuarakan isu-isu marjinal. Peneliti juga mengingatkan bahwa tanpa pemahaman etika jurnalistik yang memadai, medium ini berpotensi menjadi sarana penyebaran informasi bias. Podcast jurnalistik independen, seperti yang dikaji oleh Maflucha (2024), menunjukkan praktik etik yang bervariasi, dengan persentase produser independen tidak terikat regulasi formal, yang meningkatkan risiko informasi tidak akurat (Prasetya, 2025). Perbandingan laporan investigatif audio (Berry, 2023) mengungkap bahwa podcast independen seringkali lebih inovatif tetapi kurang akuntabel dibandingkan radio publik. Sintesis kuat adalah bahwa praktik etik di media audio sangat heterogen, tergantung pada institusi, dengan podcast independen memerlukan panduan dan pengawasan tambahan untuk menjaga integritas jurnalistik.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, praktik etik dalam media audio dicirikan oleh heterogenitas institusional yang tajam. Radio publik memegang standar yang relatif ketat, sementara ekosistem podcast independen menunjukkan kerentanan etis yang lebih tinggi. Kondisi ini menggarisbawahi urgensi pembentukan pedoman etik yang secara spesifik menjangkau aktor-aktor non-tradisional dalam produksi berita audio.

Radio publik masih mempertahankan model etika institusional yang berbasis pada *gatekeeping* tradisional, sedangkan podcast independen beroperasi di bawah model desentralisasi, di mana akuntabilitas bergeser dari institusi ke individu pembuat konten. Kondisi ini menuntut pendekatan etika yang berorientasi pada literasi media dan edukasi etika bagi kreator independen, ketimbang hanya

bergantung pada regulasi sanksi. Tanpa upaya ini, tantangan dalam menjaga kualitas dan integritas berita audio yang diproduksi oleh institusi dan independen akan terus ada, yang menunjukkan adanya "platformisasi" jurnalisme.

Tantangan utama dalam konteks podcast adalah menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab publik. Literatur menunjukkan bahwa podcast yang inovatif dalam penyampaian cerita seringkali berisiko melanggar batas etik karena tidak adanya mekanisme *peer review* atau pengawasan redaksional yang ketat. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah merumuskan model akuntabilitas yang efektif yang dapat diterapkan pada jaringan podcast tanpa menghambat inovasi kreatif.

Reinterpretasi Kode Etik untuk media audio

Sebagai implikasi studi, Literatur dari Ward (2022) merekomendasikan reinterpretasi kode etik dengan penekanan transparansi suara dan naratif, seperti identifikasi rekaman ulang (Ward, 2022); penyesuaian pedoman produksi untuk klarifikasi *editing* (Hendriyanto, 2024); kode etik tambahan untuk *podcast* independen (Maflucha, 2024); dan pelatihan jurnalis audio terhadap prinsip etika spesifik medium (UNESCO, 2023; Prasetya, 2025). Dinamika kode etik jurnalistik dalam produksi berita audio mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek teknis, naratif, institusional, hingga kultural.

Literatur yang ada menunjukkan bahwa media audio memiliki potensi besar dalam membangun narasi yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa risiko etis yang khas dan belum sepenuhnya terjawab oleh pedoman-pedoman etika yang ada. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap praktik produksi berita audio melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori etika media, jurnalisme naratif, dan regulasi digital. Sintesis ini menegaskan urgensi adaptasi kode etik untuk mengatasi risiko unik audio, memastikan bahwa kode etik berfungsi secara proaktif di era digital dengan fokus pada akuntabilitas dan inovasi etis.

Merujuk pada tinjauan literatur tersebut, dapat dilihat bahwa solusi terhadap dinamika kode etik dalam produksi berita audio terletak pada reinterpretasi proaktif yang berfokus pada transparansi teknis seperti klarifikasi editing maupun identifikasi rekaman ulang. Tak hanya itu, regulasi institusional yang secara kolektif bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme jurnalis audio dalam menghadapi resiko unik medium ini.

Reinterpretasi kode etik ini harus bergerak dari sekadar prinsip normatif menjadi pedoman teknis operasional. Hal ini berarti Kode Etik Jurnalistik harus menyertakan klausul yang mengatur secara eksplisit tentang batas penggunaan musik latar. Misalnya, musik tidak boleh digunakan untuk menciptakan emosi yang berlawanan dengan fakta. Lalu, persyaratan untuk menandai *sound effect* yang direkayasa (*foley*), dan kewajiban untuk menyatakan *editing* yang mengubah konteks naratif. Adaptasi ini memerlukan kolaborasi antar praktisi (jurnalis), regulator (Dewan Pers/KPI), dan akademisi untuk menghasilkan kerangka etika yang fleksibel namun mengikat dalam ekosistem media audio digital yang terus berubah.

Implikasi yang lebih mendalam dari kebutuhan reinterpretasi ini adalah transformasi etika jurnalistik dari "etika kata-kata" menjadi "etika *soundscape*". Jurnalis audio tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana suara-suara diatur dan disajikan. Reinterpretasi harus mencakup pengembangan "Pedoman Transparansi Audio" yang wajib diikuti, termasuk persyaratan *disclosure* jika wawancara direkam secara rahasia, penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam sintesis suara, atau modifikasi suara narasumber. Hanya dengan memasukkan aspek teknis ini, kode etik dapat berfungsi sebagai benteng yang relevan melawan risiko manipulasi di era digital.

KESIMPULAN

Praktik produksi berita audio telah berubah secara signifikan dengan kemunculan media audio seperti *podcast* dan siaran radio digital. Namun, dinamika kode etik jurnalistik dalam medium ini menghadirkan tantangan dan kerumitan baru yang memerlukan pemahaman mendalam. Meskipun prinsip-prinsip etika jurnalistik universal, seperti akurasi, objektivitas, dan independensi, tetap menjadi landasan profesional, penerapannya dalam produksi berita audio tidak selalu berjalan linier. Sifat unik dari media audio, yang mengandalkan narasi suara, intonasi, dan efek suara, dapat memengaruhi persepsi pendengar dan berpotensi menimbulkan bias naratif yang sulit terdeteksi. Studi literatur

menunjukkan bahwa karakteristik media audio, seperti keterbatasan visual dan fleksibilitas naratif, dapat menimbulkan tantangan etika yang kompleks. Misalnya, verifikasi informasi dan transparansi sumber menjadi lebih sulit karena informasi hanya disampaikan secara verbal dan tidak terekam secara permanen dalam bentuk visual. Selain itu, teknik editing suara dan penggunaan musik latar dapat memengaruhi emosi pendengar dan mengaburkan batas antara penceritaan yang sah dan manipulasi informasi. Tantangan ini diperparah oleh munculnya pembuat konten audio independen yang tidak selalu terikat pada regulasi atau pengawasan etika jurnalistik formal, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas. Meskipun demikian, media audio, terutama *podcast* alternatif, juga memiliki potensi besar untuk menyuarakan isu-isu marginal. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja etika dan regulasi yang relevan dengan ekosistem media audio *modern*. Diperlukan literasi etika yang kuat di kalangan pembuat konten audio, baik jurnalis profesional maupun independen, untuk memastikan bahwa produk informasi yang mereka hasilkan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Pada akhirnya, kajian ini menyoroti bahwa penerapan kode etik jurnalistik dalam produksi berita audio adalah proses yang dinamis dan kontekstual. Diperlukan penyesuaian terhadap pedoman etika yang ada, serta kajian interdisipliner yang menggabungkan teori etika media, jurnalisme naratif, dan regulasi digital. Dengan demikian, diharapkan praktik jurnalisme audio yang berintegritas dan bertanggung jawab dapat terus berkembang di tengah lanskap media yang terus berubah.

REFERENSI

Berry, R. (2023). *Ethical challenges in audio storytelling*. Media Ethics, 15(1), 78–95.

Fajarini, S. D., Kurniawati, J., & Yuliani, F. (2025). Transisi Media Tradisional Ke Digital (Studi Kasus Pada Media Lokal Di Bengkulu). *Jurnal Khabar: Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 7(1), 551–568.

Hendriyanto, A. (2024). *Jurnalistik 4.0: Mengarungi Gelombang Revolusi Media*.

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2023). *The elements of journalism: What newspeople should know and the public should expect* (Edisi ke-4). Crown.

Maflucha, L., Wijayanti, Q. A. N., Ikom, S., & Ikom, M. (2024). Etika Jurnalistik Dalam Era Digital: Menghadapi Tantangan Dengan Kode Etik Pers. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).

Prasetya, A. E., Lutfiah, R. M., Nugroho, S., Zulfa, N. I., Idamatussilmi, V., Ismail, A. F., … & Saputri, B. A. (2025). *Penyiaran Publik di Era Digital: Etika, Praktik, dan Profesionalisme*. Penerbit Lutfi Gilang.

Putri, E. K. P., Prakosa, F. A., Mola, M. S. R., Haspiaini, N., Setyowati, R. M., & Aladdin, Y. A. (2024). *Buku Ajar Dasar-Dasar Jurnalistik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Raintung, O. C., Mamahit, C., & Tinangon, E. N. (2024). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *LEX CRIMEN*, 12(4).

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sunarto, S., Nurul, H., & Amida, Y. (2022). *Analisis Isi Etnografis: Gaya Jurnalisme Media Konvensional dan Media Baru di Era 4.0*.

UNESCO. (2023). *Ethics in audio media: A global perspective*. UNESCO Publishing.

Ward, S. J. A. (2022). Audio journalism ethics in the digital age. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 99(2), 345–367.